

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SUMBA BARAT 2020



**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
2020**



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN SUMBA BARAT 2020**

ISBN :  
Nomor Publikasi : 53010.2129  
Katalog BPS : 4102004.5301  
Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm  
Jumlah Halaman : x + 37 Halaman

Naskah :  
*Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik*

Gambar Kulit :  
*Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik*

Diterbitkan Oleh :  
*Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat*

Dicetak Oleh :  
*CV. Inhud*

Cetakan I : Desember 2021

***Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya***

## **TIM PENYUSUN**

**Penanggung jawab:**

Ir. Joke Ratna Christina

**Penulis:**

Ervina Jayanti Siagian, SST

Cindy Artha Yunita Hutabarat, S.Tr.Stat.

**Penyunting:**

Ruth Juniar Herista, S.Tr.Stat.

**Pengolah data:**

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

**Desainer Gambar Sampul:**

Ruth Juniar Herista, S.Tr.Stat.

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat 2020” disusun guna memenuhi kebutuhan pengguna data statistik, khususnya statistik sosial. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat kembali menerbitkan Publikasi ini.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman berbagai data dasar yang bersumber dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS serta data sekunder yang diperoleh dari instansi lain di luar BPS.

Maksud penerbitan publikasi ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan kesejahteraan rakyat Sumba Barat dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi terbitnya publikasi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak kami mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Waikabubak, Desember 2021

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Sumba Barat,



Ir. Joke Ratna Christina  
NIP. 19681015 199401 2 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vii
Pendahuluan .....	viii
<b>1. Kependudukan .....</b>	<b>1</b>
- Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	1
- Kepadatan Penduduk .....	2
- Komposisi Umur dan Jenis Kelamin .....	3
- Perkawinan dan Keluarga Berencana.....	6
- Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).....	9
<b>2. Kesehatan dan Gizi .....</b>	<b>10</b>
- Status Kesehatan .....	10
- Status Gizi Balita .....	11
- Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan .....	14
<b>3. Pendidikan .....</b>	<b>17</b>
- Tingkat Pendidikan .....	17
- Tingkat Partisipasi Sekolah .....	19
- Fasilitas Pendidikan .....	21
<b>4. Ketenagakerjaan .....</b>	<b>22</b>
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja..	22
- Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan .....	24
<b>5. Pola Konsumsi .....</b>	<b>28</b>
- Perubahan Tingkat Kesejahteraan .....	28
- Pola Konsumsi Rumah Tangga .....	29
<b>6. Perumahan dan Lingkungan .....</b>	<b>31</b>
- Kualitas Rumah Tinggal .....	31
Daftar Pustaka .....	35
Istilah Teknis .....	36

## DAFTAR TABEL

	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020 ...	1
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2018 - 2020.....	2
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020).....	3
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	4
Tabel 1.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2019-2020 .....	6
Tabel 1.6	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/ Cara KB Tahun 2018-2020.....	8
Tabel 1.7	Persentase Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2020 .....	9
Tabel 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020 ...	10
Tabel 2.2	Rata-Rata Lama Pemberian ASI pada Balita Tahun 2018 – 2020 (Bulan).....	12
Tabel 2.3	Perkembangan Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Tahun 2018-2020.....	13
Tabel 2.4	Banyaknya Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Barat 2018-2020.....	14
Tabel 2.5	Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2018-2020.....	15
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-Rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2020.....	16

## DAFTAR TABEL

	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 - 2020.....	17
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018-2020.....	18
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2020.....	19
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2020.....	20
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2018-2020	21
Tabel 4.1	TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020.....	23
Tabel 4.2	Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020..	23
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2020.....	24
Tabel 4.4	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2020.....	25
Tabel 4.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020.....	26
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sumba Barat 2020.....	27
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Tahun 2018-2020	29
Tabel 5.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (Rupiah).....	30
Tabel 6.1	Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2018-2020 .....	32
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2018-2020.....	33

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2018 – 2020 (%).....	2
Gambar 1.2	Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2020..	5
Gambar 1.3	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2020....	5
Gambar 1.4	Rasio Jenis Kelamin Menurut Status Perkawinan Tahun 2020...	7
Gambar 1.5	Persentase Wanita 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2018-2020 (%).....	7
Gambar 1.6	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahun 2020.....	9
Gambar 2.1	Angka Kesakitan Sumba Barat dan Provinsi NTT 2020.....	11
Gambar 2.2	Pertolongan Kelahiran Terakhir yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2018-2020.....	15
Gambar 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2020.....	17
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 .....	22
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 .....	24
Gambar 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2020.....	30
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tinggal menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2018-2020..	32
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2018-2020.....	33

## PENDAHULUAN

### 1. Ruang Lingkup

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat 2020 ini merupakan lanjutan dari seri publikasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan rakyat secara garis besar, diperlukan pengelompokan beberapa masalah sosial yang penting. Ada beberapa tabel yang tidak dimuat kembali dan ada pula data-data baru yang dimasukkan. Penyajian masalah sosial tersebut dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Pola Konsumsi
6. Perumahan dan Lingkungan

Indikator yang disajikan pada dasarnya berbentuk deskriptif yang telah dipilih, dengan harapan dapat menggambarkan suatu keadaan kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat.

Bentuk penyajian data, selain tabel dasar pada beberapa kelompok disajikan ukuran statistik yang lazim dipergunakan seperti persentase, rasio, proporsi, dan rata-rata yang semuanya ditujukan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi.

## **2. Sumber Data**

### **Sensus Penduduk**

Sensus Penduduk diselenggarakan setiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia, telah diselenggarakan 7 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000, 2010, dan 2020.

Sensus Penduduk menggunakan dua tahap pencacahan, yaitu pendataan bangunan (listing) dan pencacahan lengkap. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

### **Survei Sosial Ekonomi Nasional**

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Mulai Tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan dan pada sejak 2015 pelaksanaannya dirubah secara semester yaitu pada bulan Maret dan September.

Susenas mengumpulkan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan KOR (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- (a) Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan
- (b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, dan
- (c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumah Tangga, Kriminalitas

## **Survei Angkatan Kerja Nasional**

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Tahun 2011-2014, kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan dilakukan secara triwulanan. Pelaksanaan Sakernas Triwulanan Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November). Namun sejak tahun 2015 pelaksanaan Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran seperti sebelum tahun 2011, yaitu dilaksanakan pada bulan Februari untuk semester I dan bulan Agustus untuk semester II.

## **Sumber Data Lainnya**

Selain dari sensus dan survei, Inkesra 2020 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder.

# 1. Kependudukan

## 1. Kependudukan

## Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk, tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya akan merupakan beban (*liability*) pembangunan jika berkualitas rendah.

Berbagai hal tentang penduduk yang perlu diamati antara lain mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi dan distribusi penduduk, dan lain-lain sangat penting dan berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

### Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berbeda dengan data jumlah penduduk hasil proyeksi pada tahun 2016 – 2019, jumlah penduduk Sumba Barat pada tahun 2020 merupakan hasil pendataan Sensus Penduduk 2020 yaitu mencapai 145.097 jiwa. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Sumba Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2016	123.913	1,63
2017	125.776	1,50
2018	127.872	1,67
2019	129.710	1,44
2020*	145.097	2,63**

Catatan: \*) Hasil Sensus Penduduk 2020

\*\*) Pertumbuhan penduduk 2020 dibandingkan 2010

Secara absolut terlihat bahwa jumlah penduduk Sumba Barat terus bertambah namun secara relatif (yang dilihat dari laju pertumbuhan penduduk) terlihat bahwa laju jumlah penduduk Sumba Barat mengalami stagnasi bahkan pertumbuhannya dibawah angka tiga persen bila dibandingkan tahun 2010. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah berhasil menahan laju pertumbuhan penduduk, karena jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat mengakibatkan beban pembangunan yang semakin berat untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tetapi jika mampu diseimbangkan dengan daya dukung dan daya tampung, serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya dapat menjadi salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan.

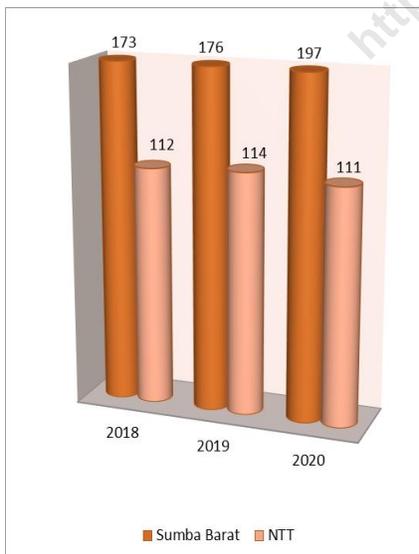
### **Kepadatan Penduduk**

Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai luas daratan sebesar 737,42 km<sup>2</sup> atau 1,54 persen dari total luas daratan wilayah Nusa Tenggara Timur, mempunyai rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 173 dan 176 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 197 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2018-2020**

Uraian	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumba Barat	173	176	197
NTT	112	114	111

**Gambar 1.1**  
**Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2018-2020 (Jiwa/Km<sup>2</sup>)**



Jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur, maka rata-rata kepadatan penduduk Sumba Barat berada di atasnya baik pada keadaan tahun 2018, 2019, maupun tahun 2020. Rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 adalah 112 jiwa per km<sup>2</sup>, 114 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2019, dan 111 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2020.

### **Komposisi Umur dan Jenis Kelamin**

Komposisi penduduk menurut umur sangat penting sebagai dasar penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Komposisi penduduk menurut umur juga sangat penting dalam kependudukan. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur. Kebutuhan akan suatu pelayanan bervariasi sepanjang siklus kehidupan. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk umur sekolah dasar (umur 7-12 tahun) sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar akan cukup tinggi.

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (Berdasarkan Sensus Penduduk 2020)**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	L + P
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	9.236	8.838	18.074
5-9	7.545	7.322	14.867
10-14	7.713	6.997	14.710
15-19	7.350	6.770	14.120
20-24	7.158	6.790	13.948
25-29	6.317	6.024	12.341
30-34	5.724	5.404	11.128
35-39	4.656	4.540	9.196
40-44	4.298	4.192	8.490
45-49	3.531	3.507	7.038
50-54	2.950	2.814	5.764
55-59	2.362	2.128	4.490
60-64	1.959	1.857	3.816
65-69	1.416	1.416	2.832
70-74	1.029	1.060	2.089
75+	1.094	1.100	2.194
<b>Total</b>	<b>74.338</b>	<b>70.759</b>	<b>145.097</b>

---

---

## Kependudukan

Penduduk usia 0-14 tahun berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2019 sebesar 37,59 persen, usia 15-64 tahun sebesar 58,32 persen dan yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 4,09 persen dari total penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk Sumba Barat tergolong penduduk muda karena persentase penduduk anak-anak (usia di bawah 15 tahun) cukup besar, sementara persentase penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) rendah.

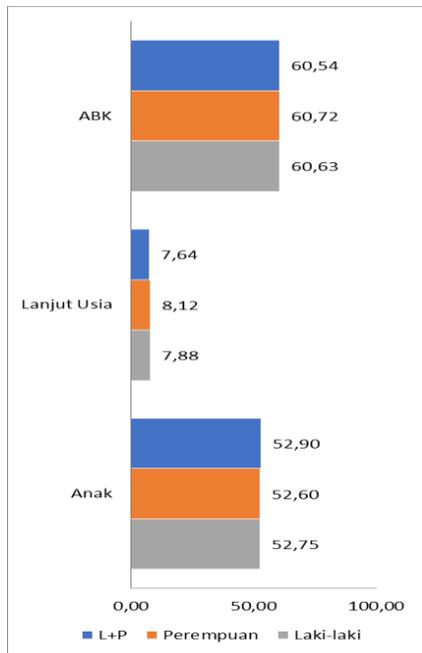
**Tabel 1.4 Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	L + P
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	6,37	6,09	12,46
5-9	5,20	5,05	10,25
10-14	5,32	4,82	10,14
15-19	5,07	4,67	9,73
20-24	4,93	4,68	9,61
25-29	4,35	4,15	8,51
30-34	3,94	3,72	7,67
35-39	3,21	3,13	6,34
40-44	2,96	2,89	5,85
45-49	2,43	2,42	4,85
50-54	2,03	1,94	3,97
55-59	1,63	1,47	3,09
60-64	1,35	1,28	2,63
65-69	0,98	0,98	1,95
70-74	0,71	0,73	1,44
75+	0,75	0,76	1,51
<b>Total</b>	<b>51,23</b>	<b>48,77</b>	<b>100,00</b>

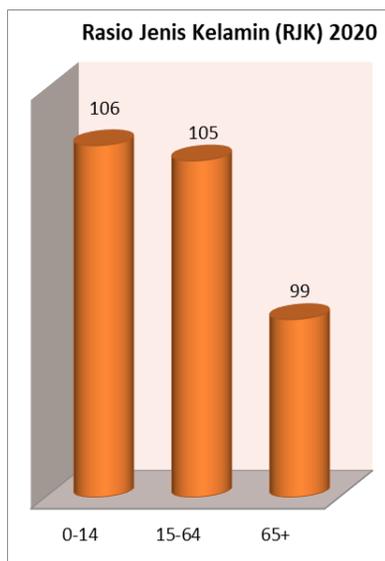
Catatan : Berdasarkan Sensus Penduduk 2020

Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan masih belum signifikan, terlihat pada komposisi penduduk menurut umur, yaitu dengan masih tingginya proporsi penduduk tidak produktif (berumur muda dan lanjut usia). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kelahiran dan juga meningkatnya penduduk usia tua. Kedua faktor tersebut membuat Angka Beban Ketergantungan (ABK/*dependency ratio*) menjadi besar.

**Gambar 1.2**  
**Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2020**



**Gambar 1.3**  
**Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2020**



Pada tahun 2019 persentase penduduk anak-anak di Sumba Barat adalah 37,59 persen sedangkan persentase penduduk lanjut usia sebesar 4,09 persen. Dengan demikian, beban tanggungan anak (*child dependency*) cukup tinggi yaitu 64 dari ABK sebesar 71. Tingkat kelahiran yang tinggi cenderung diikuti oleh angka beban tanggungan anak yang tinggi pula. Sedangkan angka beban tanggungan lanjut usia (*old aged dependency*) pada tahun 2019 relatif kecil, yaitu 7.

Ukuran yang paling umum untuk melihat struktur jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Ketidakseimbangan dalam struktur jenis kelamin merupakan salah satu masalah kependudukan yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi dan dapat mempengaruhi penyediaan pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan terdapat perbedaan jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki dan perempuan.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) pada waktu lahir biasanya di atas angka 100, yang artinya jumlah bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan. Selanjutnya sejalan dengan perkembangan umur (sampai umur belasan), maka rasio jenis kelamin ini turun mendekati angka 100. Pada umur selanjutnya jumlah penduduk perempuan biasanya melebihi banyaknya penduduk laki-laki, atau rasio jenis kelaminnya di bawah angka 100. Dengan kata lain, laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada kelompok umur muda, dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki pada kelompok umur tua. Pola semacam ini biasanya dikaitkan dengan daya tahan hidup perempuan yang lebih baik daripada laki-laki.

Dari Gambar 1.3 dapat terlihat bahwa rasio jenis kelamin untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2020 adalah sebesar 106 dan kelompok umur 15-64 adalah 105. Sedangkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas Rasio Jenis Kelaminnya adalah 99 yang artinya adalah dari 100 orang perempuan pada kelompok umur 65 tahun ke atas terdapat 99 orang laki-laki.

**Perkawinan dan Keluarga Berencana**

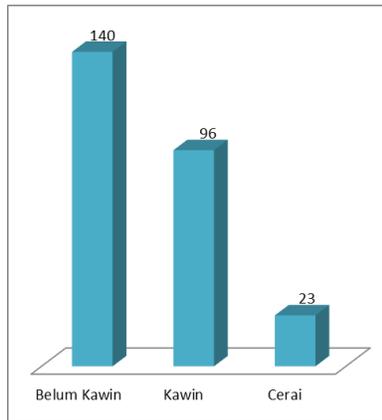
Perkawinan merupakan tuntutan biologis manusia yang berdampak menumbuhkan generasi baru. Akibatnya penambahan penduduk tidak dapat dihindari yang pada gilirannya memberi tekanan pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pengaturan kelahiran melalui program keluarga berencana adalah sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**Tabel 1.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2019-2020**

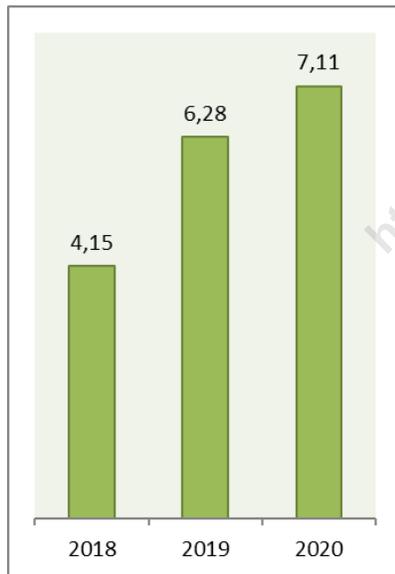
Status Perkawinan	2019			2020		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	51,36	38,79	45,29	49,55	38,81	44,36
Kawin	46,46	51,05	48,68	47,69	52,30	49,92
Cerai	2,18	10,16	6,03	2,76	8,89	5,72

Dari tabel 1.5 tampak bahwa proporsi kelompok yang belum kawin pada tahun 2020 lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka secara umum terjadi kenaikan persentase jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berada pada kelompok Kawin menjadi sebesar 49,92 persen pada tahun 2020. Jika dilihat dari Rasio Jenis Kelamin menurut Status Perkawinan pada tahun 2020 Status Belum Kawin rasionya adalah 140. Hal ini berarti pada tahun 2020, setiap seratus penduduk perempuan yang belum kawin terdapat 140 orang penduduk laki-laki yang juga belum kawin. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan laki-laki

**Gambar 1.4**  
**Rasio Jenis Kelamin Menurut**  
**Status Perkawinan**  
**Tahun 2020**



**Gambar 1.5**  
**Persentase Wanita yang Kawin**  
**di Bawah Umur 17 Tahun (%)**



untuk menunda melakukan perkawinan. Sebaliknya, pada kelompok kawin tampak bahwa proporsi penduduk perempuan lebih tinggi daripada proporsi penduduk laki-laki pada periode yang sama. Dapat terlihat pada Gambar 1.4 Rasio Jenis Kelamin (RJK) untuk Status Perkawinan status Kawin, rasionya adalah 96 yang berarti terdapat 96 laki-laki status Kawin setiap 100 orang perempuan yang berstatus Kawin.

Pada kelompok cerai tahun 2019 proporsi perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin di bawah 100. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa penduduk perempuan lebih suka memilih untuk tetap hidup sendiri daripada penduduk laki-laki.

Dipandang dari umur perkawinan pertama perempuan, persentase penduduk perempuan yang kawin di bawah umur 17 tahun pada tahun 2018 sebesar 4,15 persen. Pada tahun 2019, angka ini naik menjadi 6,28 persen namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 7,11 persen. Melihat keadaan ini, diharapkan upaya untuk mengedukasi penduduk khususnya perempuan tentang resiko menikah di usia muda agar siap menjadi ibu yang berkualitas dan mampu melahirkan anak yang berkualitas sehingga sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kabupaten Sumba Barat menjadi semakin baik.

**Tabel 1.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2018-2020**

<b>Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
MOW/Tubektomi	3,87	22,61	32,74
MOP/Vasektomi	0,00	0,00	0,00
AKDR/IUD	1,96	1,73	3,21
Suntikan	42,30	37,71	23,18
Susuk KB	42,70	33,85	30,17
Pil KB	9,17	1,29	1,60
Kondom	0,00	0,00	0,00
Intravag	0,00	0,00	0,00
Alat/Cara Tradisional	0,00	2,81	9,11

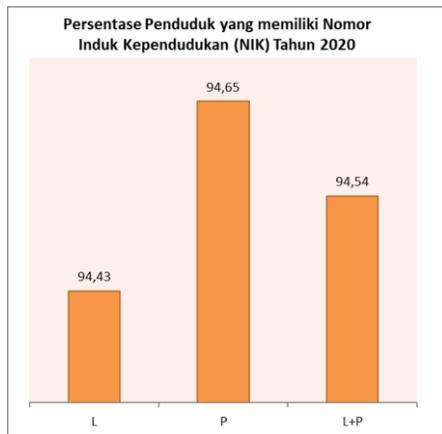
Pada tahun 2020 sebanyak 52,61 persen dari penduduk perempuan Sumba Barat berada pada usia produktif (15-49 tahun). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020, perempuan yang memiliki status kawin dan sedang memakai/menggunakan alat KB, sebagian besarnya memakai/menggunakan MOW/Tubektomi sebesar 32,74 persen dan di urutan berikutnya adalah dengan menggunakan Susuk KB sebagai alat/cara KB dengan persentase sebesar 30,17 persen. Sedangkan Suntikan berada di urutan ketiga dengan persentase pemakai/pengguna sebesar 23,18 persen. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengatur kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi ibu dan anak-anak yang dilahirkannya, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.

**Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Tidak hanya sebatas deretan angka, NIK memiliki fungsi penting untuk berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi sehingga harus dimiliki oleh setiap penduduk.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020, sebanyak 94,54 persen Penduduk Sumba Barat telah memiliki NIK, dimana jumlah perempuan yang memiliki NIK lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 94,65 persen yang artinya dalam setiap 100 orang penduduk laki-laki, terdapat enam penduduk yang tidak/belum memiliki NIK.

**Gambar 1.6**  
**Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tahun 2020**



**Tabel 1.7** **Persentase Penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2020**

Tahun	0 – 4 Tahun			>5 Tahun		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	61,57	61,96	61,76	90,70	89,89	90,31
2019	68,98	74,36	71,82	98,71	96,39	97,60
2020	70,76	72,92	71,81	98,01	98,00	98,01

Berdasarkan Tabel 1.7, pada Tahun 2020 sebanyak 98,01 persen penduduk yang berumur di atas lima tahun telah memiliki NIK, sedangkan untuk penduduk yang berumur nol sampai empat tahun, persentase kepemilikan NIK nya hanya sebesar 71,81 persen. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya orang tua yang tidak langsung mengurus administrasi anak-anaknya ketika lahir sehingga perlu upaya pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan registrasi kependudukan yang merata khususnya di wilayah yang sulit diakses.

## 2. Kesehatan & Gizi

### Kesehatan dan Gizi

Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional/regional, karena masalah kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang biasa dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lain dari kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur dari beberapa indikator seperti angka kesakitan dan status gizi. Beberapa indikator pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti cakupan imunisasi, penolong persalinan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat.

#### Status Kesehatan

Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan salah satunya indikator angka kesakitan. Dalam hal ini angka kesakitan menggambarkan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

**Tabel 2.1 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020**

Angka Kesakitan*)	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	27,73	20,14	12,91
Perempuan	31,81	22,38	12,15
L + P	29,71	21,23	12,54

\*) Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan

**Gambar 2.1**  
**Angka Kesakitan**  
**Sumba Barat dan Provinsi**  
**NTT 2020**



Pada tahun 2018 penduduk yang mempunyai keluhan kesakitan mencapai 29,71 persen. Ini berarti lebih dari seperempat penduduk Sumba Barat pernah mengalami keluhan kesehatan. Kemudian pada tahun 2019 angka tersebut menurun menjadi 21,23 persen, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 12,54 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat di Sumba Barat semakin baik. Status kesehatan penduduk laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, meskipun tampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang mengalami gangguan kesehatan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka kesakitan di Sumba Barat tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki angka kesakitan sebesar 19,17 persen, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.

### **Status Gizi Balita**

Peningkatan kualitas fisik sumber daya manusia akan lebih berhasil jika dilakukan sejak dini, yang dalam hal ini pemantauan status gizi balita berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas fisik penduduk Sumba Barat. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi karena selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan terhadap beberapa penyakit. Tabel 2.2 menunjukkan rata-rata lama pemberian ASI pada balita di Sumba Barat tahun 2017, 2019, dan 2020. Pada tahun 2020, untuk balita laki-laki lama pemberian ASI dilakukan selama 9-10 bulan sedangkan pemberian ASI untuk balita perempuan rata-rata dilakukan hingga usia 10-11 bulan.

**Tabel 2.2 Rata-Rata Lama Pemberian ASI pada Balita Tahun 2017 – 2020 (Bulan)**

Jenis Kelamin	2017	2019	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	9,81	9,17	9,57
Perempuan	10,62	10,29	11,23
L + P	10,21	9,75	10,25

\*) Data tahun 2018 tidak tersedia

Selama tahun 2018 dan 2019, Dinas Kesehatan Kab. Sumba Barat mencatat jumlah bayi yang bergizi buruk sekitar 60 bayi per tahun dan meningkat drastis pada tahun 2020 yaitu sebanyak 166 bayi. Pada level provinsi, NTT merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi gizi buruk yang tergolong tinggi. Sebagai langkah preventif, penguatan fasilitas kesehatan yang menjangkau hingga tingkat desa perlu dioptimalkan. Langkah preventif lain dalam peningkatan kualitas kesehatan adalah dengan pemberian imunisasi pada Balita.

**Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Tahun 2018-2020**

Status Bayi	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>BBLR</b>	92	67	12
<b>Gizi Buruk</b>	66	67	69

Dilihat dari imunisasi balita, perkembangannya selama periode 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel ini memperlihatkan jenis imunisasi balita di Sumba Barat. Dapat dilihat bahwa untuk semua jenis imunisasi, balita yang mendapatkan imunisasi berfluktuasi dari tahun 2018 ke tahun 2020.

Selama periode tahun 2018 terdapat 2.016 balita di Kabupaten Sumba Barat yang mendapatkan imunisasi lengkap dan jumlahnya meningkat di tahun 2019

menjadi sebanyak 2.890 balita, kemudian menurun menjadi sebanyak 2.597 balita pada tahun 2020. Jenis imunisasi yang paling banyak didapatkan balita adalah imunisasi Campak dimana pada tahun 2020 terdapat 3.930 balita yang mendapatkan imunisasi ini. Balita yang mendapatkan imunisasi BCG (imunisasi yang berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi tuberkulosis (TBC)) mengalami sedikit kenaikan menjadi 2.520. Untuk jenis imunisasi lainnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Banyaknya Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Barat 2018-2020**

<b>Jenis Imunisasi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
BCG	2.419	2.463	2.520
Campak	2.219	2.903	3.930
DPT 1	2.440	2.680	2.634
DPT 2	2.249	2.774	2.611
DPT 3	2.034	2.637	2.696
Polio 1	2.541	2.373	2.642
Polio 2	2.499	2.672	2.696
Polio 3	2.287	2.663	2.622
Polio 4	2.034	2.535	2.721
Hepatitis B 0	1.802	1.952	2.168
Hepatitis B 1	-	-	-
Hepatitis B 2	-	-	-
Hepatitis B 3	-	-	-
Imunisasi Lengkap	2.016	2.890	2.597

*Sumber : Sumba Barat dalam Angka 2020*

### Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Tabel 2.5 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2018-2020. Indikator ketersediaan berbagai sarana kesehatan tersebut mencakup jumlah Dokter, jumlah Puskesmas, jumlah Rumah Sakit, serta kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, pada tahun 2020 terdapat 15 dokter di Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan yang terdapat di setiap kecamatan, di tahun 2020 berjumlah 10 Puskesmas (belum termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling).

**Tabel 2.5 Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2018-2020**

Tenaga/Sarana Kesehatan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Dokter	43	71	15
Jumlah Puskesmas *)	10	10	10
Jumlah Dokter di Puskesmas	10	20	-
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	-	-	-

\*)Belum Termasuk Puskesmas Pembantu dan Keliling  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat harus datang ke rumah sakit. Pada tahun 2019 terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Sumba Barat.

**Gambar 2.2**  
**Pertolongan Kelahiran**  
**Terakhir yang Dilakukan oleh**  
**Tenaga Kesehatan Tahun**  
**2018-2020**



Bagian penting dalam upaya mengurangi insiden kematian bayi dan kematian maternal (ibu) adalah penyediaan pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Program Bidan di Desa (BDD) merupakan upaya terobosan untuk maksud tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, tercatat sampai dengan tahun 2019 jumlah bidan yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 59 bidan. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2019 ada sebanyak 74 desa/kelurahan.

Jika dilihat pada Gambar 2.2, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 92,95 persen pertolongan kelahiran terakhir dilakukan oleh tenaga medis. Pada tahun 2019 angka ini sedikit mengalami penurunan menjadi 92,55 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 94,48 persen. Penurunan ini tentu harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk mengupayakan fasilitas, akses maupun penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan ibu hamil terkait pentingnya persalinan dengan tenaga kesehatan yang diharapkan dapat menekan angka kematian bayi.

### Perilaku Merokok Masyarakat

Berdasarkan Tabel 2.6, pada tahun 2020, untuk setiap 100 orang penduduk Kabupaten Sumba Barat terdapat sekitar 29-30 orang perokok, dengan jumlah rokok yang dihisap sebanyak 44-45 batang rokok per minggu. Penduduk dengan pendidikan SD ke bawah memiliki persentase perokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dengan pendidikan SMP ke atas, yaitu sebanyak 31-32 perokok per 100 orang penduduk kelompok ini.

**Tabel 2.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-Rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2020**

<b>Pendidikan Tertinggi</b>	<b>Penduduk Usia &gt;15 Tahun yang Merokok (%)</b>	<b>Rata-rata Rokok yang Dihisap Per Minggu</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
SD ke bawah	31,70	39,52
SMP ke atas	26,73	52,16
<b>Total</b>	<b>29,35</b>	<b>44,95</b>

# 3. Pendidikan

## 3. Pendidikan

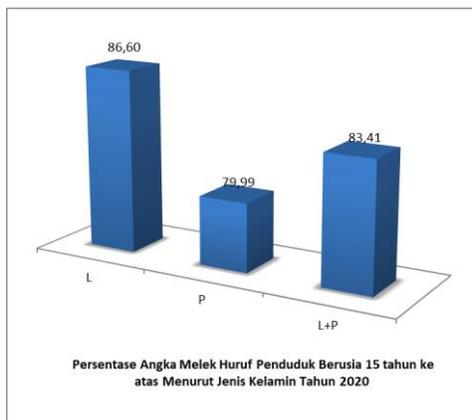
### Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Pada saat ini, jangkauan wajib belajar semakin diperluas menuju wajib belajar 12 tahun. Dengan program ini diharapkan hampir semua penduduk yang berusia 7-18 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas atau sederajat.

#### Tingkat Pendidikan

Pada tingkat makro, tingkat pendidikan yang sangat mendasar dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk dewasa (umur 15 tahun ke atas). Pada tahun 2020 lebih dari 80 persen penduduk Sumba Barat telah melek huruf. Lebih dari itu, persentase laki-laki yang melek huruf lebih besar daripada perempuan. Hal tidak terlepas dari struktur penduduk kita yang jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

**Gambar 3.1**  
Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2020



**Tabel 3.1 Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2020**

Indikator	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,52	6,53	6,60
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,88	12,89	13,11

Selain angka melek huruf, indikator pendidikan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Sementara itu, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

RLS tahun 2018-2020 yang ditunjukkan pada tabel 3.1 menggambarkan bahwa jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Sumba Barat usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal adalah sebesar 6 hingga 7 tahun atau setara tamat SD. Sementara itu, HLS tahun 2018-2020 sebesar 12 hingga 13 tahun berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2018-2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 hingga 13 tahun atau setara dengan Diploma I.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 15 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, peningkatan pendidikan penduduk terus menerus terjadi, yaitu dengan semakin banyaknya penduduk yang berpendidikan lebih tinggi.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2018-2020**

<b>Ijazah Tertinggi yang Dimiliki</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Tidak Punya Ijazah	38,25	32,32	34,11
SD/MI/Sederajat	18,19	20,75	18,71
SLTP/MTs	16,78	18,29	17,48
SLTA/MA/ke atas	21,87	28,64	29,70

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berpendidikan SMA/ke atas pada tahun 2018 sebesar 21,87 persen, kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 29,70 persen. Sementara itu, tamatan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat pada tahun 2020 masing-masing sebesar 18,71 persen dan 17,48 persen. Sedangkan pada tahun

yang sama jumlah penduduk yang tidak punya ijazah adalah sebesar 34,11 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Banyaknya proporsi penduduk yang tamatan SD/Sederajat ke bawah harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah karena diketahui juga bahwa untuk pembangunan yang berkelanjutan, kebutuhan akan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil dirasakan sangat mendesak.

### **Tingkat Partisipasi Sekolah**

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk memajukan negara dan merupakan fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Untuk melihat kondisi pendidikan di kabupaten Sumba Barat salah satunya melalui tingkat partisipasi sekolah yaitu dengan melihat Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka partisipasi kasar akan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkatan pendidikan.

Partisipasi sekolah menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.3. Pada tahun 2020, APK untuk jenjang pendidikan SD di Kabupaten Sumba Barat sebesar 113,44. APK yang lebih besar dari 100 berarti terdapat penduduk di luar usia 7-12 tahun bersekolah pada Sekolah Dasar. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen antara lain disebabkan oleh pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2020**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
SD/MI	116,97	113,24	113,44
SMP/MTs	97,30	92,69	93,88
SMA/SMK/MA	79,11	90,10	90,39
Perguruan Tinggi	13,07	14,79	N/A

Sementara untuk APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan angka dibawah 100. Artinya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan bersangkutan masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Dengan kata lain, masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SMP/MTs dan penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA. Terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Dengan adanya subsidi pendidikan dan juga bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu diharapkan angka partisipasi sekolah semakin tinggi.

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2020**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
SD/MI	97,93	97,14	97,54
SMP/MTs	69,87	69,54	69,99
SMA/SMK/MA	55,44	56,07	56,39
Perguruan Tinggi	11,23	10,33	N/A

Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 3.4 menunjukkan penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD sebesar 97,54 persen pada tahun 2020. Penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMP sebesar 69,99 persen. Sementara itu, hanya setengah dari penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMA/ sederajat. Perbedaan tingkat APM antar tingkat pendidikan menunjukkan kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah angka partisipasi sekolahnya.

**Fasilitas Pendidikan**

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan harus sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Tabel 3.5 menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2020 ini Rasio Murid-Guru relatif stabil dibanding tahun sebelumnya untuk jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar 16, yang artinya setiap satu guru mengawasi 16 orang murid. Pada jenjang SD Rasio Murid-Guru juga mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 17, yang artinya ada sebanyak 17 murid yang diawasi oleh setiap guru. Sedangkan pada jenjang SLTP Rasio Murid-Guru adalah sebesar 13 pada tahun 2020, artinya setiap guru mengawasi 13 murid. Semakin kecil angka rasio Murid-Guru diharapkan akan semakin baik pengawasan guru terhadap murid. Rasio Guru-Sekolah pada tahun 2020, untuk jenjang SD relatif stabil dibanding tahun sebelumnya, yaitu untuk jenjang SD 12 banding 1, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP mengalami kenaikan menjadi 18 banding 1, dan untuk jenjang SLTA mengalami kenaikan menjadi 36 banding 1.

**Tabel 3.5 Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2018-2020**

Jenjang Pendidikan	2018		2019		2020	
	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>SD</b>	20	12	18	12	17	12
<b>SLTP</b>	16	17	13	18	13	18
<b>SLTA</b>	16	31	14	33	16	36

## 4. Ketenagakerjaan

### 4. Ketenagakerjaan

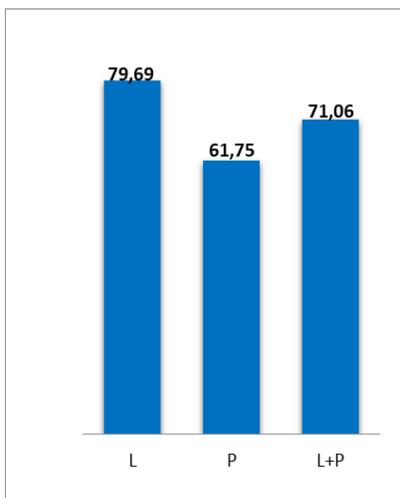
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2020, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan (kategori angkatan kerja) tercatat sebesar 71,06 persen, terdiri dari 96,04 persen penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dan 3,96 persen penduduk 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan.

#### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan), disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri di Sumba Barat perempuan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan jumlahnya juga cukup banyak. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dan semakin besarnya keinginan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah.

**Gambar 4.1**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020**



**Tabel 4.1 TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	73,87	53,23	63,97
2019	77,86	61,18	69,80
2020	79,69	61,75	71,06

Tabel 4.1 menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi kaum laki-laki dan perempuan dalam iklim ketenagakerjaan Sumba Barat. Hal ini ditunjukkan oleh TPAK laki-laki yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari total 62 ribu angkatan kerja di Sumba Barat, 36 ribunya adalah laki-laki. Meskipun demikian TPAK perempuan tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan yang semakin aktif dalam pasar tenaga kerja Sumba Barat.

**Tabel 4.2 Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	96,99	94,36	95,94
2019	97,26	96,30	96,85
2020	95,24	97,16	96,04

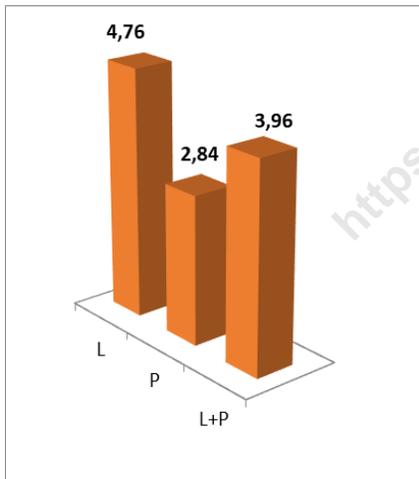
Banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Pada tahun 2018 tingkat kesempatan kerja

sebesar 95,94 persen dan angka ini mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 96,04 persen.

**Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2020**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	3,01	5,64	4,06
2019	2,74	3,70	3,15
2020	4,76	2,84	3,96

**Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020**



Tabel 4.3 menunjukkan angka pengangguran terbuka tahun 2018-2020. Angka-angka yang tertera pada tabel 4.3 ternyata masih relatif rendah bahkan untuk ukuran internasional. Hal ini terjadi karena di Sumba Barat dan Indonesia pada umumnya, menganggur merupakan keadaan yang tidak mungkin dilakukan oleh penduduk, sehingga kesempatan kerja yang tersedia langsung diterima sebagai pekerjaan padahal kesempatan kerja yang ada tersebut umumnya adalah sektor informal. Secara definisi mereka dianggap bekerja sekalipun pendapatan yang diperoleh relatif rendah.

### Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Sektor primer (pertanian) merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2020 sebanyak 33.692 pekerja

diserap sektor primer. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya perkembangan pada sektor yang lebih modern, yaitu sektor sekunder/industri dan sektor jasa-jasa/tersier. Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, jumlah penduduk yang bekerja di sektor sekunder (industri; listrik, gas, dan air; dan konstruksi) dan tersier (perdagangan; transportasi dan komunikasi; keuangan; dan jasa) pada tahun 2020 berturut-turut sebanyak 7.505 pekerja dan 19.249 pekerja. Sektor pertanian, administrasi pemerintahan dan perdagangan terbukti berperan penting dalam menyerap tenaga kerja yang banyak dan juga memberikan kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumba Barat.

**Tabel 4.4 Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2020**

Lapangan Usaha Utama*	Penduduk yang Bekerja	
	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Primer	33.692	55,74
Sekunder	7.505	12,42
Tersier	19.249	31,84

*\*)Primer: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*

*Sekunder: Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas dan Air; Industri Pengolahan; Konstruksi*

*Tersier: Perdagangan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi & Komunikasi; Jasa Keuangan; dan Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Jasa Pendidikan dan Kesehatan; Jasa Lainnya*

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan utama yaitu: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta

pekerja tidak dibayar. Gambaran mengenai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama pada tahun 2020 di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020**

Status Pekerjaan Utama	Penduduk yang Bekerja	
	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
<b>Berusaha sendiri</b>	8.773	14,51
<b>Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar</b>	18.901	31,27
<b>Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar</b>	543	0,90
<b>Buruh/karyawan/pegawai</b>	14.223	23,53
<b>Pekerja bebas</b>	669	1,11
<b>Pekerja keluarga/ tak dibayar</b>	17.337	28,68

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 14,51 persen sedangkan berusaha dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap mencapai 31,27 persen. Selain itu, jumlah pekerja berstatus buruh/karyawan tahun 2020 sebanyak 23,53 persen sedangkan pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap hanya sebesar 0,90 persen. Kedua kategori ini, buruh/karyawan dan berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap, termasuk dalam kategori pekerja di sektor formal yang jumlahnya hanya mencapai 38,04 persen pada tahun 2020. Dengan demikian pada tahun 2020, jumlah pekerja di sektor informal sudah mencapai 61,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Sumba Barat bekerja di sektor informal, dimana pekerja tersebut adalah pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap tanpa harus menerima upah yang tetap atau bahkan anggota rumahtangga yang tidak menerima upah sepeser pun.

Usia 15 tahun merupakan usia yang telah cukup untuk mulai bekerja. Pemerintah menetapkan usia ini sebagai usia minimal bagi para pekerja. Jika dilihat berdasarkan struktur usia penduduk yang bekerja, pada tahun 2020 pekerja milenial mendominasi pasar kerja Sumba Barat. Hal ini tidak menjadi bonus tersendiri dalam pasar kerja jika lapangan usaha yang digeluti masih pertanian konvensional. Oleh karena itu peran pemerintah dalam mengoptimalkan pekerja usia 25 hingga 45 tahun menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja secara menyeluruh di masa depan.

**Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Sumba Barat 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
15-19	2002	1325
20-24	4063	2229
25-29	4567	3427
30-34	4897	3674
35-39	4504	3050
40-44	3762	2928
45-49	3146	2307
50-54	2686	2114
55-59	1952	1913
60+	3291	2609

# 5. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Makin besar pendapatan atau penghasilan suatu rumah tangga, berarti makin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya makin kecil pendapatan suatu rumah tangga berarti makin rendah tingkat kesejahteraannya. Penghitungan pendapatan masyarakat secara langsung melalui survei seringkali sulit dilakukan, sehingga untuk mengatasi kesulitan itu, maka penghitungannya dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan.

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dibedakan menurut jenisnya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran ini selain dapat diketahui jumlah pendapatan, juga dapat dilihat pola konsumsi masyarakat, yang mana semakin rendah persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya akan semakin baik, sebaliknya makin tinggi persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya makin buruk. Atau dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan.

## **Perubahan Tingkat Kesejahteraan**

Faktor utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah daya beli, sehingga apabila daya beli menurun, maka berdampak pada menurunnya kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun. Tabel 5.1 menyajikan perkembangan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2018-2020. Perkembangan pengeluaran per kapita tiga tahun terakhir belum memperlihatkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan yang signifikan dalam masyarakat jika dikaitkan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan riil dari pengeluaran per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2018 adalah Rp. 623.154. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan pengeluaran per kapita menjadi Rp. 617.685 atau terjadi peningkatan nominal setahun sebesar -0,88 persen. Kemudian pada tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk Sumba Barat mengalami peningkatan menjadi Rp. 748.105 atau terjadi peningkatan nominal setahun sebesar 21,11 persen. Peningkatan ini terjadi terutama pada pengeluaran non makanan serta komponen pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga.

**Tabel 5.1 Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan Tahun 2018-2020**

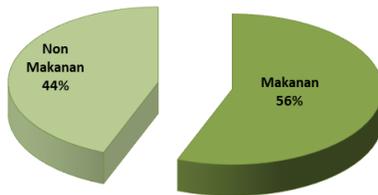
<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)</b>	<b>Peningkatan Nominal Setahun (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
2018	623.154	
2019	617.685	-0,88
2020	748.105	21,11

---

### **Pola Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Keadaan ekonomi Indonesia yang bergejolak hingga saat ini masih diyakini berdampak pula pada pola pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Pola konsumsi yang terjadi pada masyarakat cenderung lebih kepada konsumsi makanan. Penurunan standar hidup secara drastis akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga memaksa masyarakat khususnya yang berpendapatan

**Gambar 5.1**  
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2020



rendah untuk melakukan tindakan dengan pola konsumsi yang lebih memberikan prioritas pada pengeluaran untuk makanan.

**Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (Rupiah)**

Tahun	Makanan	Non Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	418.375 (55,92)	329.730 (44,08)	748.105

*Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase pengeluaran*

Tabel 5.2 menyajikan pola konsumsi rumah tangga selama periode 2020. Pada periode ini, porsi pengeluaran untuk makanan adalah sebesar 55,92 persen. Sedangkan porsi pengeluaran untuk non makanan sebesar 44,08 persen. Pola konsumsi dimana porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan merupakan salah satu fenomena yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya tercapai selama periode tersebut. Meskipun begitu proporsi pengeluaran non makanan pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Idealnya konsumsi non makanan akan meningkat seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Penduduk yang penghasilannya kecil akan menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan akan menurun dan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan meningkat. Data proporsi konsumsi non makanan tiga tahun terakhir relatif menurun. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat masih menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan makanan. Belum ada transformasi kesejahteraan yang signifikan dalam masyarakat Sumba Barat.

# 6. Perumahan & Lingkungan

---

## Perumahan dan Lingkungan

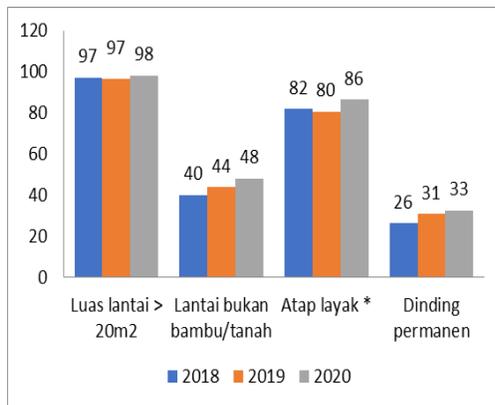
Manusia dan alam lingkungannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan ini berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial manusia selalu ingin bersama orang lain, maka muncul kelompok rumah-rumah yang disebut pemukiman.

Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu merupakan hal penting yang menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga menentukan tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 1,97 persen rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat yang tinggal dalam rumah dengan ruang yang tersedia untuk setiap rumah tangganya kurang dari 20 m<sup>2</sup>. Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga (98,03 persen) tinggal dalam rumah dengan luas yang memadai. Luas lantai merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan rumah tangga dari sisi perumahan.

**Gambar 6.1**  
**Persentase Rumah Tinggal**  
**Menurut Beberapa Indikator**  
**Kualitas Perumahan**  
**Tahun 2018-2020**



Kualitas perumahan di Sumba Barat pada periode 2018-2020 ditunjukkan pada tabel 6.1, yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan selama periode tersebut. Persentase rumah tangga dengan lantai bukan bambu/tanah relatif meningkat selama tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa 6 dari 10 rumah tangga di Sumba Barat masih memiliki lantai dari bambu/tanah. Masih tingginya jumlah rumah tinggal dengan lantai bambu di Sumba Barat disebabkan karakteristik budaya masyarakat Sumba Barat yang membuat rumah panggung.

**Tabel 6.1** **Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2018-2020**

Indikator Kualitas Perumahan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Luas lantai > 20 m <sup>2</sup>	97,18	96,63	98,03
Lantai bukan Bambu/Tanah	40,02	43,69	48,19
Atap layak *)	81,80	80,37	86,28
Dinding Permanen**)	26,16	30,75	32,56

\*) Tidak terbuat dari dedaunan

\*\*\*) Dinding Tembok

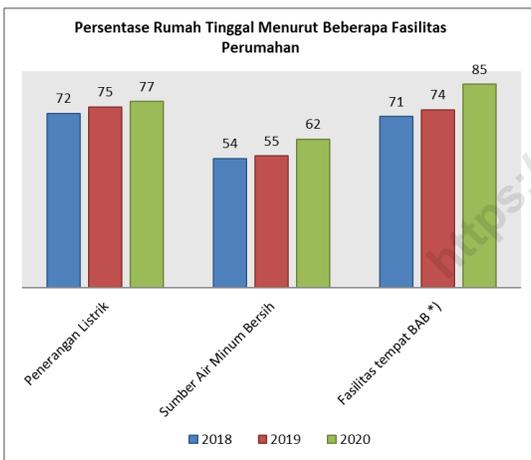
Tidak jauh berbeda dengan indikator lantai tanah, indikator dinding tembok permanen menunjukkan angka yang bisa dikatakan masih cukup kecil yaitu 26,16 persen pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan menjadi 32,56 persen pada tahun 2020. Dengan kata lain, Sekitar 7 dari 10 rumah tangga di Sumba Barat masih belum menggunakan dinding permanen. Sebagaimana pada indikator lantai tanah, hal ini dikarenakan masih banyak rumah adat di Sumba Barat masih menggunakan dinding bambu atau kayu.

Salah satu indikator perumahan yang kualitasnya terus membaik adalah penggunaan atap rumah yang layak. Pada tahun 2020 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat (86,28 persen) sudah menggunakan atap layak, antara lain menggunakan seng sebagai atap rumah. Meskipun demikian masih terdapat sekitar 2 dari 10 rumah tangga masih menggunakan atap yang terbuat dari dedaunan. Secara umum

perkembangan kualitas luas lantai, jenis lantai, jenis atap, dan jenis dinding rumah relatif membaik dalam tiga tahun terakhir. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki rumah layak huni, maka semakin baik kualitas kehidupan masyarakat Sumba Barat.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya penerangan listrik, sumber air minum bersih, dan fasilitas tempat buang air besar (BAB).

**Gambar 6.2**  
**Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2018-2020**



**Tabel 6.2** **Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2018-2020**

Indikator Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerangan Listrik	72,45	75,16	77,32
Sumber Air Minum Bersih	53,55	54,67	61,66
Fasilitas tempat BAB	71,08	74,00	84,53

Seperti yang terlihat pada Tabel 6.2 pada tahun 2020 sudah sekitar 77,32 persen rumah tangga di Sumba Barat menggunakan listrik sebagai alat penerangan, dimana 54,13 persen menggunakan listrik PLN sedangkan 23,19 persen menggunakan listrik Non-PLN. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Sumba Barat yang belum dapat dijangkau oleh PLN, sehingga masih menggunakan penerangan pelita/obor. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 2 sampai 3 dari 10 rumah tangga di Sumba Barat menggunakan sumber penerangan bukan listrik, misalnya pelita. Terbatasnya distribusi listrik PLN di beberapa desa menyebabkan sumber penerangan bukan listrik menjadi pilihan alternatif. Secara umum distribusi listrik selama tiga tahun terakhir terus mengalami perluasan.

Sumber air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam

kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2020 di Sumba Barat banyaknya rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 61,66 persen. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat hampir setengah penduduk Sumba Barat belum memiliki sumber air minum bersih.

Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Kesadaran masyarakat Sumba Barat akan sanitasi layak semakin baik dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 84,53 persen rumah tangga di Sumba Barat telah menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan tertutup. Hal ini merupakan perubahan yang signifikan mengingat pada tahun 2018 hanya 71,08 persen penduduk Sumba Barat yang memiliki sanitasi layak.

## DAFTAR PUSTAKA

- 2021, **Sumba Barat Dalam Angka**,  
Waikabubak: Badan Pusat Statistik
- 2020, **Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur**,  
Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2020, **Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat**,  
Waikabubak: Badan Pusat Statistik

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

## ISTILAH TEKNIS

### **Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

### **Kepadatan Penduduk**

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

### **Rasio Anak Wanita**

Rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15-44 th).

### **Rasio Jenis Kelamin**

Banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

### **Metode Kontrasepsi**

Cara/alat pencegah kehamilan.

### **Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)**

Orang yang mempraktekan salah satu metode kontrasepsi.

### **Klinik Keluarga Berencana**

Tempat dimana pelayanan keluarga berencana dapat diperoleh. Tempat ini dapat berupa rumah sakit, puskesmas, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), Team Medis Keliling (TMK) atau tempat bebas lainnya yang ditentukan.

### **Status Gizi**

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategorisasi status gizi ini dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

### **Pengeluaran**

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

### **Penduduk Usia Kerja**

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

## ISTILAH TEKNIS

### **Bekerja**

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja.

### **Angkatan Kerja**

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

### **Penganggur**

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

### **Angka Beban Tanggungan**

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

### **Angka Partisipasi Kasar**

Rasio anak yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

### **Angka Melek Huruf**

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

### **Luas Lantai**

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SUMBA BARAT

Jalan Wee Karou, Waikabubak , Sumba Barat  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 87284

Homepage: <http://www.sumbabaratkab.bps.go.id>

E-mail: [bps5301@bps.go.id](mailto:bps5301@bps.go.id)